

Analysis of the Implementation of the Government Financial Accounting System in Improving the Quality of Regional Government Financial Reports (Case Study at the Sunggal Sub-District Office, Deli Serdang Regency)

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

Jukhairia Ritonga¹⁾; Saparuddin Siregar²⁾; Muhammad Lathief Ilhamy Nasution³⁾
Faculty of Islamic Economics and Business, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
Email: ¹⁾ jukhairiaritonga2071@gmail.com; ²⁾ saparuddin@uinsu.ac.id; ³⁾ mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [16 Juli 2023]
Revised [18 Agustus 2023]
Accepted [22 Agustus 2023]

KEYWORDS

Government Financial Accounting System, Quality of Financial Statements

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintahan untuk menambah tingkat mutu laporan keuangan pemerintahan daerah yang terdapat di Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah penelitian yang menerapkan teknik deskriptif kualitatif dengan metode mengumpulkan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan menampilkan penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintahan memiliki potensi untuk menambah tingkat kualitas laporan keuangan pemerintahan Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

ABSTRACT

This study seeks to determine how the use of the government financial accounting system affects the caliber of local government financial reports in the Sunggal District Office, Deli Serdang Regency. This study employs a qualitative descriptive methodology and uses interviewing and documenting as data collecting approaches. According to the study's findings, the Sunggal District Office in the Deli Serdang Regency might benefit from the installation of a government financial accounting system by producing better financial reports.

PENDAHULUAN

Perkembangan reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan pembaharuan pengetahuan perihal tata kelola finansial pemerintahan, berupa pemerintahan tingkatan pusat ataupun daerah. Sistematisasi tata kelola keuangan juga banyak terjadi perubahan sejalan dari zaman yang semakin berkembang dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga fenomena tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembuatan keputusan di dalam pemerintahan. (Kakisina, 2020, hal.54)

Transparansi dan akuntabilitas untuk laporan keuangan adalah satu dari beberapa permasalahan yang masih sering diabaikan dalam pengaplikasian laporan keuangan dalam pemerintahan. Masih banyak kita temui isu-isu hangat perihal terdapat berbagai kasus mengenai mutu pelaporan keuangan buruk beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut adalah akibat dari kurangnya pemahaman para akuntan pemerintahan mengenai standar akuntansi pemerintahan, kurangnya pemahaman terhadap kode etik akuntan publik dan juga pengendalian internal yang buruk sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap rendahnya mutu pelaporan keuangan pemerintahan.

Satu dari beberapa bentuk nyata untuk peningkatan keterbukaan maupun akuntabilitas dalam mengelola finansial Negara yaitu melalui mengimplementasikan dan menjalankan kebijakan akuntansi yang berlaku di suatu Negara dengan tepat dan sesuai pedoman yang berlaku. Pemerintah Daerah, memiliki hak dan wewenang dalam mengelola pemerintah dan kebutuhan publik berdasarkan pada kebijakan undang-undang yang hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kendala yang masih sering ditemui dalam penerapan sistem keuangan daerah di Kecamatan Sunggal adalah yaitu aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan masih terus mengalami pembaharuan dan belum stabil. Hal tersebut tentunya sebagai hambatan untuk pelaporan laporan keuangan. Dari segi akuntabilitas, ketetapan indeks harga yang masih berubah-ubah membuat proses penyusunan RAB yang terhambat. (Khairun Mahfis & Dwi Rahmadiane, n.d., 2020, hal. 2)

Terdapat beberapa kendala yang terjadi pada Kantor Camat Sunggal dalam penerapan system akuntansi Pemerintah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan seperti: Terdapat perubahan sistem

aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang terus menerus sehingga menimbulkan kesulitan bagi bendahara umum dalam mengikuti perkembangan yang terbilang begitu sering dan dalam waktu yang cepat, adanya perubahan aturan seperti potongan dalam suatu kebijakan dan hanya disampaikan melalui web pemerintah kabupaten saja dan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kantor camat, juga kurang maksimalnya pengadaan Bimbingan Teknik (Bimtek) guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan pemerintahan Daerah.

LANDASAN TEORI

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi juga dimaknai dengan suatu koneksi yang terbagi menjadi formulir, riwayat, tahapan, peralatan, dan tenaga kerja untuk dapat memperoleh data terhadap sebuah instansi dalam kepentingan pemeliharaan, operasional, dan juga mengambil keputusan untuk pihak yang membutuhkan. (Ryan et al., 2013, hal 18)

Terdapat berbagai sistem penyusunan catatan yang diterapkan pada system akuntansi keuangan daerah yang umum terbagi dari tiga prosedur yakni Single Entry, Double Entry, Triple Entry. System akuntansi keuangan daerah berperan sentral untuk memberi informasi yang bersifat transparan pada aktivitas serta hasil kerja keuangan pemerintahan daerah guna memberikan fasilitas terwujudnya akuntabilitas dan transparansi publik. Kewajiban atas pelaksanaan akuntabilitas keuangan mewajibkan pemerintahan daerah dalam membenahi system penyusunan catatan dan laporan (Zeny Antika et al., 2020, hal 217)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pada pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang tata kelola finansial daerah dan ketentuan tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah dikelola dalam kebijakan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Pemerintah Republik Indonesia, 2019, PMK Pasal 4)

Terdapat dua pendekatan dasar dalam akuntansi yakni berbasis akrual serta kas. Berbasis kas yaitu suatu konsep penyusunan catatan dimana kegiatan bisnis terjadi ketika alat pembayaran murni didapat dan diberikan. Sementara berbasis akrual yaitu penyusunan catatan kegiatan bisnis meski alat pembayaran belum benar diterima atau dikeluarkan, peristiwa tersebut terjadi tanpa melihat kas ataupun sama dengan pembayaran kas. (Harmain, 2019, hal. 8) Standar Profesional Akuntansi menjelaskan terdapat beberapa yang memungkinkan terselenggaranya sistem akuntansi yang efektif yaitu:

- 1) Pengidentifikasi dan pencatatan segala transaksi yang baik.
- 2) Transaksi yang waktunya tepat dan terperinci hingga memberikan kemungkinan pengelompokan transaksi yang seharusnya untuk laporan keuangan.
- 3) Pengukuran nilai transaksi menggunakan langkah memberi kemungkinan pencatat nilai uang yang wajar untuk pelaporan.
- 4) Menetapkan waktu adanya kegiatan bisnis dalam memberi kemungkinan catatan terhadap waktu akuntansi yang seharusnya.
- 5) Penyajian dengan seharusnya transaksi dan pengungkapan pada laporan keuangan. (Kamila, 2015, hal. 21-22)

Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Islam

Sistem akuntansi pada konteks syariah diartikan dengan sekumpulan beberapa dasar hukum yang stabil, didapat melalui berbagai sumber ajaran agama berupa dari proses analisa, ukuran serta penjelasan sebagai landasan untuk menerangkan suatu fenomena. terdapat ayat yang lain di dalam Al-Qur'an mengenai konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh Allah memintamu menyampaikan amanah bagi seseorang yang mempunyai hak mendapatkannya, dan jika dirimu menentukan hukum dai manusia hendaklah dirimu menentukannya secara adil. Sungguh Allah sebenar-benarnya yang memberikan pengajaran padamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Kaitan antar surah An-Nisa' dengan konsep akuntabilitas yakni ada di konsep dasar. Dalam ayat itu juga disampaikan bahwa setiap orang yang diembankan suatu tugas maka wajib untuk memberi tugas tersebut pada seseorang yang memiliki hak mendapatkannya. Sama halnya dengan konsep akuntabilitas, dimana pada umumnya yaitu bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberi. Seseorang akuntan publik jika telah diberi amanah untuk mengelola keuangan pemerintahan, wajib baginya menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggungjawab. (Onsardi et al, 2019, hal. 252)

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi keuangan daerah yaitu sebuah tahapan perlakuan identifikasi pencatatan, ukuran, serta laporan kegiatan bisnis keuangan perekonomian menurut suatu instansi pemerintahan setempat yang disusun menjadi suatu bentuk data sebagai bentuk mengambil kebijakan dari berbagai pihak eksternal pemerintahan yang membutuhkan. (Susanti, 2020, hal. 3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ayat 3 menjelaskan bahwasanya secara dasar kegiatan bisnis perekonomian yaitu rangkain kegiatan yang berkaitan pada uang. Pembuatan ukuran terhadap kegiatan perekonomian menerapkan satuan uang, sehingga segala kegiatan bisnis akuntansi seharusnya dikatakan dengan satuan tersebut. Terdapat macam-macam sistem pencatatan akuntansi pemerintah, yaitu:

1. Single Entry : Istilah "Single Entry" juga sering digunakan untuk menjelaskan metode pencatatan entri tunggal. Transaksi ekonomi dicatat dalam sistem ini hanya dengan satu kali pencatatan. Bagian penerimaan akan diterapkan dalam mencatat transaksi yang menambah kas, sedangkan bagian pengeluaran akan diterapkan dalam mencatat transaksi yang mengurangi kas.
2. Double Entry : Pencatatan double entry juga dikenal dengan penjumlahan. Pada pencatatan double entry terdapat bagian debet dan kredit.
3. Triple Entry : Triple entry merupakan pembuatan catatan dalam buku anggaran serta catatan menerapkan pendekatan double entry. Sedangkan penyusunan catatan di buku anggaran dibuat bagi pembuatan pelaporan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PP NO. 71 Tahun 2010

Kualitas pada laporan keuangan Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan suatu ukuran yang bersifat normatif yang harus diciptakan pada informasi akuntansi sehingga instansi pemerintahan bisa mencapai sasarannya. Ada terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah yang mencakup:

a. Relevan

Jika informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna menganalisis fenomena di waktu sebelumnya maupun terkini, mengantisipasi masa depan, dan memvalidasi serta mengevaluasi hasil evaluasi mereka di masa lalu, maka pengetahuan tersebut dapat berdampak pada kebijakan pengguna. Akibatnya, informasi dalam laporan keuangan yang relevan bergantung pada bagaimana informasi itu akan digunakan.

b. Andal

Informasi laporan keuangan harus dapat diverifikasi, bebas dari salah tafsir dan ketidakakuratan besar, dan memberikan semua fakta insiden yang relevan secara jujur. Jika penyajian laporan keuangan tidak dapat diandalkan maka dapat dipastikan laporan keuangantersebut keliru.

c. Dapat Dibandingkan

Jika informasi pelaporan bisa diperbandingan pada laporan dri periode lalu ataupun organisasi pelaporan linnya secara umum, informasi tersebut akan jauh lebih relevan. Hanya jika suatu entitas menggunakan prinsip akuntansi yang konsisten di seluruh periode pelaporan, perbandingan internal bisa dilaksanakan. Apabila instansi yang dibandingkan menerapkan peraturan akuntansi yang serupa, yang dibandingkan pada eksternal bisa dilaksanakan. Perubahan dapat diberitahukan pada periode terjadinya jika badan pemerintah mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih unggul dari prinsip akuntansi saat ini.

d. Dapat Dipahami

Pemakai harus bisa mengerti informasi yang ditawarkan pada pelaporan finansial, serta informasi tersebut harus dinyatakan dengan cara dan berbahasa yang sesuai pada tingkatan pengetahuannya. Maka dari itu, pemakai dianggap mempunyai kesadaran relevan terhadap operasional dan lembaga pelapor serta kemauan untuk memahami informasi yang relevan. (Masnila, 2021, hal. 17-19)

Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Laporan keuangan disusun mempunyai tujuan tertentu. Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa penyusunan laporan keuyangan dalam menyajikan informasi yang sesuai menyangkut status finansial serta segala kegiatan bisnis yang dilakukan dari sebuah instansi laporan pada periode laporan dibuat.Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat guna mencukupi keperluan informasi dari segala kelompok pengguna.

Beberapa kelompok umum pemakai laporan keuangan pemerintah, tetapi tidak ada batasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat
- 2) Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

- 3) Pihak yang berperan atau memberikan kontribusi dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- 4) Pemerintah. (Masnila, 2021, hal. 6)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang penyajian laporan keuangan. Komponen yang tercakup dalam laporan keuangan pemerintahan terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Masnila, 2021, hal. 43)

Setiap entitas pelapor menyajikan bagian penyusun laporan keuangan, terkecuali:

- 1) Laporan arus kas yang hanya disediakan oleh organisasi pemerintahan umum.
- 2) Hanya bendahara umum Negara dan badan pelaporan yang membuat laporan keuangan gabungan yang diizinkan untuk menyajikan laporan perubahan saldo anggaran. (Masnila, 2021, hal. 44)

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menerapkan studi deskriptif kualitatif, dimana studi tersebut membahas mengenai berbagai hal yang mungkin dalam pemecahan permasalahan secara akurat menggunakan langkah pengumpulan data, klasifikasi data serta analisis data lalu dilakukan penyusunan guna mampu dikaji berdasarkan teori yang sesuai dan berkaitan pada permasalahan yang diteliti dan ditentukan kesimpulan berbentuk tugas akhir. Sementara itu penggunaan pendekatan untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini adalah riset yang memperoleh berbagai temuan dan tidak bisa dicapai dari menerapkan tahapan statistika ataupun dengan pengukuran.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penggunaan waktu pada penelitian ini yaitu pada bulan Desember 2022 – Maret 2023. Penggunaan sumber data pada penelitian ini yaitu hasil wawancara langsung dan laporan keuangan Tahun 2021 Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari daerah pantai bagian timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km² atau 3,34% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian ini dapat kita lihat dari tabel laporan keuangan Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sunggal 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021
PENDAPATAN DAERAH	1.042.200.000,00	341.774.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.042.200.000,00	341.774.000,00
Retribusi Daerah	1.042.200.000,00	341.774.000,00
BELANJA DAERAH	7.849.373.243,00	6.897.043.091,00
BELANJA OPERASI	7.764.045.899,00	6.897.043.091,00
Belanja Pegawai	3.936.519.207,00	3.629.990.726,00
Belanja Barang dan Jasa	3.827.526.692,00	3.270.052.365,00
BELANJA MODAL	85.327.344,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.327.344,00	0,00
SURPLUS/(DEVISIT)	(6.807.173.243,00)	(6.555.269.091,00)
SILPA	(6.807.173.243,00)	(6.555.269.091,00)

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal 2021

Dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan diperoleh berbagai hal yang menyangkut mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan Pemerintah yaitu terdapat perubahan sistem aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang terus menerus sehingga menimbulkan kesulitan bagi bendahara umum dalam mengikuti perkembangan yang terbilang begitu sering dan dalam waktu yang cepat.

Dijelaskan dalam wawancara tersebut bahwa pihak dari Kabupaten Deli Serdang memang sudah mengadakan Bimbingan Teknik (BIMTEK) namun Bimtek tersebut belum cukup maksimal dan belum bisa dikatakan sudah mencapai target dikarenakan ditemukan di lapangan untuk pengaplikasian bimtek belum maksimal dipahami oleh para bendahara di Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara juga didapat begitu seringnya terjadi perubahan mengenai sistem aplikasi laporan keuangan dan lebih keseringan para bendahara di Kecamatan diarahkan untuk memahami sendiri (otodidak) perihal perubahan tersebut. Perubahan aplikasi tersebut juga mengakibatkan para pegawai keuangan terkhusus di Kecamatan Sunggal tersebut kewalahan dengan aplikasi yang terus-menerus mengalami perubahan tersebut.

Pada hasil wawancara juga dinyatakan bahwa adanya perubahan aturan seperti potongan dalam suatu kebijakan seperti aturan pajak dan Pada hasil wawancara juga dinyatakan bahwa adanya perubahan aturan seperti potongan dalam suatu kebijakan seperti aturan pajak dan potongan BPJS yang hal tersebut hanya disampaikan melalui web pemerintah kabupaten saja dan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kantor Camat secara langsung dan hal tersebut juga membuat sedikit kendala pada pembuatan laporan pada Kantor Camat Sunggal.

Perkembangan teknologi dan perkembangan pengelolaan sistem yang sesuai dengan seperangkat aturan yang sesuai dengan masa sekarang (regulasi) sangat mempengaruhi kebutuhan stakeholder mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Kantor Camat Sunggal menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pada Kantor Camat Sunggal sudah cukup baik, namun harus lebih diasah kembali kemampuan atau keahlian para sumber daya manusia terkhusus di bidang keuangan untuk tetap terus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba teknologi seperti saat ini.

Pada Kantor Camat Sunggal dalam pendekatan dasar akuntansi nya juga sudah menerapkan basis akrual yang dimana ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yang dimana dalam proses pencatatan akuntansi, pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadi penambahan nilai di dalam jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan pemerintah daerah sewajibnya diberikan pada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lama tiga bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran, berdasarkan pada kebijakan Pemerintahan No. 12 Tahun 2019 mengenai tata kelola keuangan daerah. Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada Kantor Camat Sunggal selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan Kecamatan Sunggal kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan.

Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis accrual untuk periode tahun 2019-2021, namun untuk penyajian laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2019-2021 kantor Camat Sunggal tidak menyajikannya padahal dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran terdapat ada sisa saldo anggaran di akhir periode pelaporan.

Suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan baik apabila memenuhi 4 karakteristik laporan keuangan agar dapat terwujudnya informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya serta bisa bermanfaat untuk berbagai pihak yang memerlukan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pihak kantor Camat menginformasikan bahwa mereka telah membuat seluruh komponen laporan keuangan pada Kantor Camat Sunggal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Sunggal sudah baik begitu juga dengan output yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal Kabupaten sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu terdapat beberapa komponen dan juga dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pihak kantor Camat Sunggal sedikit kewalahan dengan pembaharuan sistem akuntansi yang terus mengalami perubahan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Sunggal kurang bisa dinyatakan baik, hal ini dikarenakan masih kurang maksimalnya pengadaan BIMTEK bagi sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dalam pengoperasian sistem akuntansi dan kurang terdapat penyelenggaraan sosialisasi dan pengadaan latihan dengan rutin yang diterapkan Kabupaten Sunggal Deli Serdang untuk Bendahara Kec. Sunggal, jadi pengaruh masalah itu bisa menyebabkan mutu pelaporan keuangan yang berkurang oleh Kantor Camat Sunggal.

Saran

Sebaiknya di tahun selanjutnya pada kantor Kec. Sunggal lebih dapat beradaptasi lagi dengan perkembangan teknologi yang dimana akan selalu ada perubahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah dan juga bagi pihak Kabupaten Deli Serdang harus lebih dimaksimalkan pengadaan Bimbingan Teknik dan juga apabila ada perubahan dalam kebijakan seharusnya dikomunikasikan langsung dengan pihak kecamatan bukan hanya sekedar mengumumkannya melalui web saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Kota Medan. (2020). Kecamatan Medan Sunggal Dalam Angka 2019. (Vol. 59).
- Djanegara, M. S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Kesatuan Press.
- Desnovira, April (2019). *Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kecamatan Salimpaung Sebelum Dan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, lain Batusangkar
- Fauziah, I. (2018). Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Fauziah, E. M. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah Di K.* Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 4(2), 196–209. <https://doi.org/10.48181/Jratirtayasa.V4i2.6386>
- Febransyah, Astari, Dinda. (2021). *Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir.* Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol 2 (No 2).
- Harahap, E. A. (2015). Hadis Hadis Ekonomi. Medan: Kencana.
- Harmain, E. A. (2019). Pengantar Akuntansi 1. Medan: Madenatera.
- Husna, Ade, Dkk. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Serambi Konstruktif, Vol 4 (Nomor 2)*,
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. J. (2018). M. Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1999) H. 234 45. 45–51.
- Kakisina, S. M. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara.* Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas, 7(1), 53–62. <https://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/view/95%0ahttps://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/viewfile/95/55>
- Kamila, H. H. (2015). *Akuntansi Syariah Sebuah Tinjauan Implementatif.* Uin Sumatera Utara: Febi Uin-Su Press.
- Marliyah, R. D. (2021). Akuntansi Syariah. Medan: Febi Uin-Su Press.
- Masnila, N. (2021). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Solok, Sumatera Barat: Cv. Mitra Cendekia Media.
- Molle, Suenita Sarah, Manafe, A. Henny, Perseveranda. (2022). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol 4 (3). <https://dinastirev.org/jimt>,
- Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2020). Accountability In The Management Of Village Fund From The Islam Perspective. *Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 4 (No.3)*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Media Hukum, 184.
- Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK.05/2011 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127242/pmk-no-238pmk052011>
- PEMKAB DELI SERDANG. (2017). Profil Kabupaten Deli Serdang <https://profil.deliserdangkab.go.id/assets/uploads/profil/Profil-Deli-Serdang-Tahun-2017.pdf>